

**NORMALISASI SUNGAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN BANJIR
OLEH DINAS PUPR DI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

M. Naufal Qistan Khalik

NPP. 29.0405

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: qistankhalik@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The author focuses on the problems of flooding and inundation that often occur in the city of Palembang and efforts to normalize rivers and creeks as an effort to prevent them. **Purpose :** The purpose of this study was to determine the role of the PUPR Service in efforts to normalize rivers for flood prevention in the city of Palembang. **Method :** This research uses descriptive qualitative method using role theory according to Siagian. Data collection techniques were conducted by interview (6 informants), observation, and documentation. **Result :** The results obtained by the author in research on river normalization in the context of flood prevention found that the government as a stabilizer has been running well, the government as an innovator has been running well, the government as a modernizer is quite good, the government as a pioneer is running well and the government as the executor itself is still fairly lacking and need to improve coordination between related parties. **Conclusion:** The conclusion is that the Palembang City PUPR Service has carried out its role in terms of flood prevention efforts which are still ongoing, this is due to good collaboration between related agencies and agencies as well as the community. In order to continue to preserve the river and prevent flooding, it is recommended to optimize the use of information technology and social media to conduct socialization in order to increase public awareness and knowledge and collaborate with various parties in flood prevention efforts.

Keywords: Flood, PUPR Service, Normalization, Government, River.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan banjir dan genangan yang sering terjadi di Kota Palembang dan upaya normalisasi sungai serta anak sungai sebagai upaya pencegahannya. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas PUPR dalam upaya normalisasi sungai untuk pencegahan banjir di Kota Palembang. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori peran menurut Siagian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (6 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/ Temuan** Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian mengenai normalisasi sungai dalam rangka pencegahan banjir ditemukan bahwa pemerintah sebagai stabilisator sudah berjalan dengan baik pemerintah sebagai innovator sudah berjalan dengan baik, pemerintah sebagai modernisator sudah cukup baik, pemerintah sebagai pelopor berjalan dengan baik dan pemerintah sebagai pelaksana sendiri masih terbilang kurang dan perlu ditingkatkannya koordinasi antar pihak terkait. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang didapat dimana Dinas PUPR Kota Palembang telah melaksanakan Peran dalam hal upaya pencegahan banjir yang sampai sekarang masih terus berjalan, hal ini dikarenakan adanya

kolaborasi yang baik antar dinas dan instansi terkait dan juga masyarakat. Guna untuk terus menjaga kelestarian sungai serta mencegah terjadinya banjir, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk melakukan sosialisasi demi meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan banjir. **Kata kunci:** Banjir, Dinas PUPR, Normalisasi, Pemerintah, Sungai.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banjir merupakan permasalahan tentunya terjadi di hampir seluruh kota di Indonesia, dan tentunya juga di kota Palembang. Masalah banjir di Kota Palembang sudah menjadi masalah yang serius bagi pemerintah. Banjir di kota Palembang terjadi akibat banjir pasang musiman maupun banjir genangan akibat hujan lebat dan pendangkalan sungai serta sistem drainase yang kurang baik. Banjir ialah peristiwa semesta yang dapat menimbulkan korban hilangnya harta dan benda, penduduk juga bisa menyebabkan korban jiwa. Selanjutnya banjir dapat merusak bangunan sarana, prasarana dan lingkungan hidup serta merusak kehidupan bermasyarakat.

Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hujan, hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, pendangkalan sungai dan tata wilayah yang kurang baik serta sarana dan prasarana kurang memadai. Dari kejadian di atas, dapat diambil sebuah gagasan untuk menambah kapasitas tampungan pada sungai, memberikan alternatif seperti normalisasi sungai serta mensimulasikan dengan bantuan program sebagai upaya pencegahan banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kota tengah melakukan normalisasi sungai untuk meminimalisasi risiko banjir seperti pengerukan sungai dan anak sungai untuk mengatasi banjir yang melanda di berbagai titik Kota Palembang. Untuk Mengatasi hal tersebut, telah dipersiapkan rencana seperti melakukan upaya normalisasi sejumlah anak sungai ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir banjir di Kota Palembang, akan tetapi masalah banjir di Kota Palembang masih terjadi di sejumlah titik. Permasalahan ini diakibatkan oleh sungai yang meluap. Oleh karena itu, normalisasi sungai penting dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi kerugian serta dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh banjir pada saat curah hujan yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas PUPR tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Renstra SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Visi Kepala SKPD yang tertuang dalam Renstra SKPD ini harus disesuaikan dengan visi kepala daerah yang didalamnya berisi kebijakan program, dan kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung dan memberikan kontribusi atas tercapainya visi kepala daerah. Sehingga perlu dijadikan suatu sasaran terhadap peranan dan tanggung jawab dari Dinas PUPR sebagai dinas yang terlibat dalam normalisasi sungai dan anak sungai untuk pencegahan banjir di Kota Palembang

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Diwaktu hujan yang tergolong lebat di Sebagian besarnya daerah Kota Palembang pastinya akan tergenang oleh air di berbagai titik kota, selain permasalahan banjir yang terus terjadi, sampah hingga pengendapan sedimen di sejumlah anak sungai yang masih ada turut membuat anak sungai meluap ke permukaan, sehingga tidak jarang Kota Palembang mengalami bencana banjir, sampah yang menumpuk menjadikan sungai tidak bisa menahan kecanggihnya debit air pada anak sungai.

Kota Palembang terbelah oleh sungai, Hujan dengan intensitas tinggi sering terjadi dan semakin banyaknya aktivitas manusia yang memperlakukan sungai dengan tidak semestinya seperti masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke sungai mendirikan bangunan liar diatas sungai, anak sungai yang tentunya mengganggu aliran sungai yang mengakibatkan tidak adanya ruang untuk air mengalir sehingga terjadinya pendangkalan sungai. Hal ini perlu diantisipasi dan dilakukan upaya normalisasi sungai untuk meminimalisir banjir saat terjadi hujan yang deras di berbagai titik Kota Palembang. Dalam hal ini Dinas PUPR merupakan urusan pemerintahan wajib yang merupakan salah satu pelayanan dasar dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dinas PUPR harus melaksanakan tupoksi yang menjadi kewajibannya sebagai pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pembangunan yang baik dan dapat mensejahterakan daerah tersebut. Pemerintahan daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya serta kekayaan alam yang terdapat di daerahnya dengan optimal demi mengatasi permasalahan yang ada di daerah tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kebencanaan maupun konteks penanggulangan bencana. Penelitian Wetta Putri Lestari berjudul Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mencegah Banjir di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu menemukan bahwa banjir yang terjadi di Kota Bengkulu diakibatkan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap alih fungsi lahan sehingga kurangnya daerah resapan air/ ruang terbuka hijau, Penelitian ini fokus kepada drainase dan daerah resapan air serta ruang terbuka hijau di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Lestari, 2021). Penelitian Henrika Riantika terfokus pada upaya yang cakupannya mengenai ditetapkan kebijakan pembangunan yang beresiko terjadinya bencana, serta kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang (Riantika, 2020). Penelitian Nanda, Maulana dan Prilla selanjutnya berkaitan dengan Strategi penanggulangan bencana banjir Desa Karangligar dimuat dalam penyelenggaraan kebencanaan mulai dari pra bencana, saat bencana terjadi dan pasca bencana, Penelitian ini berfokus pada pengurangan resiko bencana banjir berbasis kesiapsiagaan Desa Tangguh Bencana Nanda, Maulana, Prilla, 2021). Selanjutnya penelitian oleh Kusno Ferianto dan Uci Nurul Hidayati dalam efektivitas pelatihan penanggulangan bencana dengan metode simulasi terhadap perilaku kesiapsiagaan bencana banjir pada siswa SMAN 2 Tuban, Siswa merupakan salah satu aset bangsa yang rentan bencana dan tidak ada kesiapan dalam menghadapi bencana. Namun demikian, berdasarkan pengalaman siswa organisasi anggota PMR dan SATGAS KESDA, menunjukkan belum ada pembelajaran pelatihan simulasi bencana. Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pelatihan penanggulangan bencana dengan metode simulasi terhadap perilaku kesiapsiagaan bencana banjir pada siswa SMAN 2 Tuban (Ferianto & Hidayati, 2019). Kemudian Penelitian oleh Dandi Darmadi menunjukkan bahwa upaya pemerintah pusat dalam penanganan bencana berfokus pada penanganan para pengungsi, pemulihan perumahan penduduk serta fasilitas umum. Akan tetapi dalam komunikasi pemerintahan yang terjadi di bencana banjir bandang Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pemerintah pusat kurang komunikatif, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan seperti pendayagunaan relawan dan distribusi logistik tidak merata dan kurang terarah (Darmadi, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pencegahan banjir dalam hal ini normalisasi sungai, anak sungai dan juga alirannya., metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif dan juga berbeda dengan penelitian Wetta, Henrika, maupun Dandi Darmadi, dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Siagian yang mengatakan bahwa Pemerintah itu memiliki peran yang lebih terlihat atau lebih banyak dalam proses pembangunan dan peran pemerintah tersebut dibagi menjadi Peran pemerintah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peranan Dinas PUPR Kota Palembang dalam menormalisasi sungai untuk pencegahan banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dan fakta yang kemudian mengaitkannya dengan teori yang memiliki relevansi dengan yang sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya. sebagai prosedur penelitian, metodologi kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala dinas PUPR, sekretaris dinas PUPR, kepala bidang sumber daya air dinas PUPR, kepala seksi drainase, kepala seksi sumber daya air dan petugas lapangan bidang sumber daya air dinas PUPR. Kemudian peneliti menggunakan tahap-tahap analisis data dengan mereduksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan dengan mencari hubungan antara fenomena yang ada berdasarkan fakta serta berpedoman pada landasan teori, sehingga dapat menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara komprehensif terhadap objek dengan waktu dan kondisi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tentang Normalisasi Sungai Dalam Rangka Pencegahan Banjir dimana hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah sebagaimana pendapat Siagian, yang mengatakan bahwa Pemerintah itu memiliki peran yang lebih terlihat atau lebih banyak dalam proses pembangunan dan peran pemerintah tersebut dibagi menjadi Peran pemerintah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri.

3.1 Peranan Dinas PUPR Kota Palembang dalam Normalisasi Sungai untuk Pencegahan Banjir Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

a. Pemerintah sebagai Stabilisator

Menurut teori ini pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan atau mengatasi segala permasalahan itu agar tidak menjadi gejolak sosial atau memperburuk suatu keadaan dengan melakukan hal-hal yang bertahap juga berkesinambungan seperti halnya dalam menormalisasi sungai. Dinas PUPR Kota Palembang khususnya bidang Sumber Daya Air memiliki andil yang besar dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Palembang yang sedari dahulu merupakan daerah yang

dipenuhi rawa, salah satunya dengan melakukan Upaya Mitigasi Struktural yaitu Normalisasi Sungai. Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Palembang, upaya yang dilakukan untuk mencegah banjir di Kota Palembang, disampaikan bahwa Kota Palembang adalah daerah yang relatif datar atau *flat*, tidak seperti Kota Bogor atau daerah dengan dataran yang tinggi ataupun daerah pegunungan, sehingga apabila terjadi hujan, Kota Palembang seringkali didapati genangan di berbagai titik, ini menandakan bahwa air tergolong lambat saat mengalir dari dataran yang tinggi menuju dataran yang lebih rendah dan pada akhirnya kembali ke sungai, melihat hal itu peran pemerintah khususnya Dinas PUPR dalam mengatasi hal tersebut dengan cara menormalisasi sungai yang pada umumnya seperti menjaga kebersihan sungai, membongkar bangunan liar diatas sungai dan saluran air, melakukan pengerukan/penggalian untuk menjaga kedalaman sungai, melebarkan muka sungai dengan cara pemasangan tanggul untuk mencegah banjir di dataran sehingga mengoptimalkan tampungan air pada sungai terutama disaat hujan dengan curah yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis analisis bahwa disini ada peran pemerintah dalam mengatasi banjir yang terjadi di Kota Palembang yaitu dengan menormalisasi sungai sangatlah kompleks dan tidak bisa setengah-setengah, seperti yang telah disampaikan bahwa normalisasi itu bukan hanya melakukan pengerukan ataupun penggalian dan pembersihan sampah serta material sedimen yang jatuh kedalam sungai tetapi juga memperhatikan saluran sistem drainase beserta komponennya dan juga tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Hasil Observasi Penulis di lapangan untuk memastikan bahwa data yang penulis dapatkan dari wawancara kepada informan diatas bahwa benar adanya Dinas PUPR melakukan salah satu upaya Normalisasi Sungai yaitu melakukan pengerukan/penggalian untuk menjaga kedalaman sungai, pembersihan saluran drainase dan sampah di sungai, dan juga melakukan penertiban bangunan liar diatas sungai ataupun saluran air. Berikut Data Anak Sungai Musi yang dilakukan Normalisasi

b. Pemerintah Sebagai Inovator

Pemerintah disini harus menjadi sumber akan hal-hal yang baru, serta menemukan solusi dari permasalahan sedang dihadapi khususnya dalam hal ini permasalahan banjir, banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi terlebih lagi di perkotaan seperti Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang berperan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut khususnya Dinas PUPR yang dalam hal ini melakukan Normalisasi Sungai dalam rangka pencegahan ataupun meminimalisir banjir dan genangan yang sering terjadi di Kota Palembang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 36 Ayat 1-3 diatas telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 yaitu untuk mengendalikan banjir perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian banjir baik secara struktural maupun non struktural. Pengendalian banjir secara struktural antara lain:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase
2. Normalisasi sungai dan anak-anak sungai
3. Pembangunan polder/ kolam retensi
4. Pengelolaan rawa
5. Pompanisasi

Upaya pengendalian banjir dilakukan dengan cara struktural dan non-struktural yang dananya berasal dari APBD Kota Palembang, kegiatan non struktural dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu menerapkan peraturan perundang-undangan, membentuk komunitas pencinta sungai, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian kegiatan struktural seperti Normalisasi Sungai, Pompanisasi, Perbaikan Sluran Drainase, dan Pembuatan

Kolam Retensi sebagai bentuk pengelolaan Sumber Daya Air yang baik di Kota Palembang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki petugas pemeliharaan sungai yang rutin melakukan pengerukan dan pengangkatan tanah atau material dari dasar sungai dan juga membersihkan sampah didalamnya untuk mencegah pendangkalan sungai, karena kalau sungai dangkal akan cepat meluap ke daratan pada saat hujan dengan intensitas yang tinggi dan agak lama, Pengerukan dilakukan untuk mengembalikan kapasitas sungai yang berkurang akibat sedimentasi. yang dikhawatirkan luapan sungai disaat hujan dapat menyebabkan banjir dan genangan di daratan, permukiman masyarakat dan tempat tempat lainnya. Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas PUPR terus menerapkan Rencana Strategis Dinas PUPR Tahun 2019-2023 khususnya dalam pengendalian banjir di Kota Palembang seperti menormalisasi 15 anak sungai di Kota Palembang, Pembuatan 8 Pompa Pengendali Banjir, serta 46 Kolam Retensi, hal tersebut terus dilakukan agar air hujan yang jatuh ke bumi dapat mengalir melalui saluran drainase, bisa juga dibantu dengan kekuatan pompa pengendali banjir, ditampung didalam kolam retensi dan pada akhirnya akan kembali lagi ke sungai. Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Pemerintah berperan sebagai innovator dimanna pengendalian banjir itu dapat dilakukan dengan cara struktural ataupun non-struktural. Pengendalian banjir secara struktural merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengendalian banjir seperti yang telah disebutkan Informan antara lain Normalisasi Sungai, Pompanisasi, dan Pembuatan Kolam Retensi, karena air yang jatuh ke bumi akan kembali lagi ke sungai walaupun melewati proses yang panjang, apalagi hal tersebut terjadi di perkotaan besar seperti Kota Palembang.

c. Pemerintah Sebagai Modernisator

Pembangunan menjadikan suatu negara menjadi mandiri, kuat, dan diakui oleh negara negara lain. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki serta memiliki visi jelas yang berorientasi kepada masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembaharuan dengan menguatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana banjir dalam hal ini oleh PUPR Kota Palembang.

Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas PUPR dalam mengembalikan fungsi sungai untuk menampung air sekaligus mempercantik kawasan daerah aliran sungai yaitu menjadikan salah satu anak sungai di Kota Palembang yaitu Sungai Sekanak-Lambidaro yang dulunya kumuh di normalisasi menjadi tempat wisata baru di Kota Palembang.

Keberadaan Sungai Sekanak Lambidaro ini selain mengembalikan fungsinya sebagai drainase utama untuk pengendalian banjir di Kota Palembang, juga untuk memperindah kawasan daerah aliran sungai serta menjadi Icon baru Kota Palembang, taman publik juga di bangun di sepanjang daerah aliran sungai. Masyarakat juga bisa menikmati fasilitas di sungai Sekanak Lambidaro yang baru dibuka seperti Jogging Track dan Arena Bermain. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengotori sungai dan menjaga kelestarian sungai.

Sungai Sekanak Lambidaro bukan hanya menjadikan fungsi sungai menjadi lebih baik dalam hal pengendalian banjir namun juga disulap menjadi destinasi wisata, terlihat warna sungai yang keruhnya berkurang, bersih dari sampah serta terdapat pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki untuk menikmati keindahan kota dan juga sebagai media interaksi sosial antar masyarakat sembari bersantai dan bermain. Hal tersebut juga diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang atas suksesnya normalisasi sungai sekanak lambidaro menjadi lebih baik, terlihat menarik dan bersih dari sampah yang dimana sungai memiliki peran penting dalam pengendalian banjir di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang rutin melaksanakan gotong royong yang dipusatkan sepanjang aliran sungai di Kota Palembang salah satunya aliran Sungai Sekanak-Lambidaro, Gotong

royong ini diikuti seluruh OPD, para relawan, komunitas dan masyarakat. gotong royong ini akan menjadi salah satu cara untuk mengedukasi serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan khususnya sungai, salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menghambat aliran air dan penurunan kualitas sungai. Anak sungai sekanak semakin cantik setelah Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS) dalam menormalisasi sungai serta menjadikan sungai sebagai salah satu destinasi wisata. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para informan diatas dapat penulis analisis bahwa Pemerintah berperan sebagai Modernisator khususnya Pemerintah Kota Palembang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam mengatasi persoalan banjir, mengedukasi masyarakat dan melakukan suatu pembaharuan dimana sungai tidak hanya menjadi wadah tempat berkumpul air dari suatu kawasan dan sebagai pengendali banjir tetapi juga harus kita jaga dan lestarikan serta dimanfaatkan menjadi tempat wisata yang indah di Kota Palembang.

d. Pemerintah Sebagai Pelopor

Pemerintah tentunya harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya dalam hal positif, dalam hal bekerja, dalam hal melakukan suatu tindakan, kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, dan berada di garda terdepan dalam berkorban demi kepentingan negara. Dinas PUPR melaksanakan tugasnya sebagai pelopor kepedulian terhadap lingkungan khususnya sungai dalam pencegahan banjir dan genangan yang sering terjadi di kota Palembang mengingat curah hujan yang tinggi sering terjadi di Kota Palembang, Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memelopori kegiatan pencegahan banjir seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah yang menyampaikan bahwa Kota Palembang sering diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi pada saat musim penghujan, Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas PUPR, didampingi oleh unsur kepolisian ataupun TNI serta juga petugas sumber daya air sendiri melakukan siaga pada titik-titik lokasi rawan banjir, dibentuk juga tim terpadu pemantauan bersama di 12 titik rawan banjir, salah satunya jalan utama dalam Kota Palembang, tim siaga banjir yang ada berfungsi untuk memperlancar genangan air yang ada di jalan-jalan protokol. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memiliki Petugas yang selalu standby serta mengecek luapan air sungai dan genangan air di beberapa titik rawan banjir disaat hujan dengan intensitas yang tinggi, hal tersebut wajib dilakukan oleh Petugas Dinas PUPR yang selalu siaga di titik-titik rawan banjir pada saat Kota Palembang diguyur hujan yang deras, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir banjir dan genangan akibat luapan air sungai, karena pada akhirnya air tersebut akan kembali lagi ke badan air yaitu sungai melalui sistem drainase yang ada di perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para informan diatas dapat penulis analisis bahwa Pemerintah berperan sebagai Pelopor khususnya Pemerintah Kota Palembang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam mengatasi persoalan banjir, dimana pemerintah disini memiliki peranan dan terlibat langsung di lapangan khususnya dalam mengatasi banjir, pemerintah menjadi pelopor/penggerak ataupun juga sebagai unsur yang pertama kali hadir pada saat permasalahan itu muncul khususnya dalam hal ini pencegahan banjir.

Untuk memastikan hal tersebut penulis terjun ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh petugas lapangan pada saat hujan sudah mulai turun, Petugas Lapangan bidang SDA Dinas PUPR selalu siaga di lokasi-lokasi rawan banjir dengan upaya mengendalikan genangan air saat hujan yang tergolong lebat di tiap titik Kota Palembang yang bertujuan untuk mempercepat aliran air kembali ke sungai melalui saluran drainase yang ada.

e. Pemerintah Sebagai Pelaksana Sendiri

Benar adanya bahwa Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab nasional dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai urusan ataupun kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta tanpa adanya peran dan dukungan dari pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 huruf c yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pemerintah disini yang memiliki peran, kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dalam hal ini juga termuat dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa dalam hal sistem pengendalian banjir terdapat pengendalian secara struktural salah satunya adalah Normalisasi sungai dan anak-anak sungai. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tentang bagaimana koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait, swasta ataupun masyarakat dalam Normalisasi sungai untuk pencegahan banjir, yang menyampaikan bahwa memang dalam urusan pengendalian banjir Dinas PUPR sendiri memiliki peran yang penting, disamping itu instansi terkait ataupun swasta juga ikut membantu dalam upaya normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya adalah penertiban bangunan liar yang berada diatas aliran sungai ataupun yang berada di sempadan sungai dengan cara dibongkar yang tentu sebelum pembongkaran telah dilakukan sosialisasi pendekatan masyarakat oleh Tim Sosialisasi Dinas PUPR Kota Palembang dibantu dengan pihak terkait bahwa tidak boleh mendirikan bangunan apapun diatas saluran drainase, anak sungai, sempadan sungai dan di badan sungai. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang Ir. H. Akhmad Bastari, bersama Dandim 0418 Palembang Letkol Inf Sumarlin Marzuki, S.E, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Camat Ilir Barat II dan Lurah 29 Ilir Palembang melakukan Monitoring dan Evaluasi serta sosialisasi penertiban bangunan yang berada disempadan sungai Tawar Kecamatan Ilir Barat II Palembang Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan banjir dan genangan di Kota Palembang. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah yang menyampaikan bahwa Penertiban/ Pembongkaran sendiri adalah Tugas Pol-PP. Dinas PUPR adalah instansi teknis tapi tidak salah melakukan action non-teknis yaitu sosialisasi. Karena kami bekerja tidak hanya normatif tetapi juga kreatif dan inovatif. Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang menciptakan sense of belonging terhadap warganya, Sosialisasi dan edukasi terkait dilarangnya bangunan liar di sempadan sungai kepada masyarakat selama ini kosong harus diisi, Apakah harus menunggu Pol-PP bergerak? Kami membentuk tim sosialisasi yang memicu, mendorong, mengajak, membangunkan stakeholder lainnya. Sebelum melaksanakan pembongkaran pemerintah wajib melakukan sosialisasi, edukasi dan pendekatan kepada masyarakat, sesuai prosedur peringatan 1,2 dan 3 diberikan oleh instansi teknis dan kelurahan lalu ditembuskan ke Pol-PP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para informan diatas dapat penulis analisis bahwa Pemerintah berperan sebagai Pelaksana Sendiri memang benar adanya, Pemerintah menjadi garda terdepan dalam pembangunan sampai pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat di wilayahnya, yang tentunya tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan hasil wawancara diatas, Pemerintah tentunya tidak bisa hanya bergerak sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya dibutuhkan stakeholder terkait, pihak swasta dan masyarakat, tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh

pemerintah secara sepihak, stakeholder terkait, swasta dan masyarakat secara bersama-sama melayani dan saling menguntungkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Normalisasi Sungai oleh Dinas PUPR sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pengerukan sedimen untuk menjaga kedalaman sungai, pembersihan sampah pada sungai, memperbaiki saluran drainase, sosialisasi pembongkaran bangunan liar serta mengajak masyarakat untuk menjaga keindahan dan kelestarian sungai. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam pencegahan banjir komunikasi serta koordinasi antar dinas atau instansi terkait dalam penanggulangan bencana khususnya banjir itu sangatlah penting layaknya temuan Darmadi dimana dalam hal darurat terutama dalam hal kebencanaan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah harus terarah dan tepat sasaran. Pencegahan banjir di kota Palembang tentu masih memiliki kekurangan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan ataupun simulasi penanggulangan bencana di Kota Palembang layaknya temuan Ferianto dan Hidayati. salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan kesempatan yang diberikan. layaknya temuan (Ferianto dan Hidayati, 2019). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam pencegahan banjir, pemerintah tidak bergerak sendiri melainkan juga adanya dukungan dari masyarakat dalam pengurangan resiko bencana seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nanda, Maulana dan Prilla dalam pengurangan resiko bencana banjir dengan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis Desa Tangguh Bencana (Nanda, Maulana, Prilla, 2021). Normalisasi Sungai diharapkan mampu meminimalisir terjadinya banjir dan genangan, menumbuhkan kesadaran masyarakat secara tidak langsung akan pentingnya menjaga kelestarian sungai layaknya penelitian Riantika yang menemukan peran BPBD seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penetapan kebijakan, dan pencegahan bencana mulai dari pra, tanggap, dan pasca bencana (Riantika, 2020).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Dinas PUPR telah melaksanakan Perannya Sebagai, Stabilisator, Inovator, Pelopor, Modernisator, dan Pelaksana Sendiri suatu urusan pemerintahan dalam rangka Normalisasi Sungai dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir di Kota Palembang, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, dan sumber daya yang dapat mendukung jalannya inovasi serta terciptanya interaksi serta kolaborasi antara stakeholder/ instansi terkait dan juga masyarakat. Dari kelima peran menurut Siagian, Peran Pemerintah yang paling menonjol adalah Peran Pemerintah sebagai Stabilisator, bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan atau mengatasi segala permasalahan dalam hal ini banjir, agar tidak menjadi gejolak sosial atau memperburuk suatu keadaan, pemerintah melakukan hal-hal yang bertahap dan juga berkesinambungan salah satunya adalah program normalisasi sungai, Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR melakukan upaya normalisasi seperti pengerukan ataupun penggalian dan pembersihan sampah serta material sedimen yang jatuh kedalam anak sungai, membersihkan saluran sistem drainase dan juga tidak mendirikan bangunan di aliran sungai dan sempadan sungai. Normalisasi Sungai tidak hanya soal pengerukan dan pembuatan tanggul tetapi juga memperhatikan aspek lainnya seperti drainase yang baik, kelestarian anak sungai, tidak mendirikan bangunan diatas air yang menghambat ruang untuk mengalirnya air, agar kapasitas tampungan sungai terjaga, kelestarian sungai juga terjaga serta mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi penelitian. Penelitian juga hanya melakukan observasi di beberapa sungai, anak sungai serta alirannya yang ada di Kota Palembang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan normalisasi sungai dalam rangka pencegahan banjir oleh dinas PUPR di Kota Palembang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Berg, B. L. *Qualitative Research Method For The Social Science*. Long Beach: California State University, 2001.
- Creswell, John W. *Research Design*. California: Sage, 2009.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Priambodo, S. Arie. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: kanisius, 2009.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta cv, 2013.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business*. New Jersey: John Wiley & Sons, 1992.
- Siagian, S.P. 2000. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, 243. *Fungsi Peran*, 2012.
- Soleh, Chabib, and Suropto. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013)
- Suripin. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Berg, B. L. *Qualitative Research Method For The Social Science*. Long Beach: California State University, 2001.
- Creswell, John W. *Research Design*. California: Sage, 2009.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Priambodo, S. Arie. Panduan Praktis Menghadapi Bencana. Yogyakarta: kanisius, 2009.

Riduwan. Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta cv, 2013.

Sekaran, Uma. Research Methods for Business. New Jersey: John Wiley & Sons, 1992.

Siagian, S.P. 2000. Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, 243. Fungsi Peran, 2012.

Soleh, Chabib, and Suropto. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media, 2011.

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012)

———, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA, CV, 2013)

Suripin. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Badan Pusat Statistik. “Badan Pusat Statistik Luas Daerah Dan Jumlah Pulau.” bps.go.id, 2019. <https://www.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. “Letak Geografis Dan Batas Wilayah Kota Palembang Geographical Lay And Limits Of Palembang City Region.” palembangkota.bps.go.id, 2019. <https://palembangkota.bps.go.id/statictable/2017/11/14/86/letak-geografis-dan-batas-wilayah-kota-palembang.html%0ABadan>.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023.” Palembang, 2018.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Profil Sumatera Selatan.” sumselprov.go.id, 2021. <https://sumselprov.go.id/Profil-Sumsel/>.

Urban Id. “Anak Sungai Musi Mendangkal, Butuh Rp300 Miliar Untuk Normalisasi.” kumparan.com, 2019. <https://kumparan.com/urbanid/anak-sungai-musi-mendangkal-butuh-rp300-miliar-untuk-normalisasi-1sVUyWXE6s7>.

Putra, Ady Syaf. “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi.” Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan 2, no. 3 (2014).

Tobari. “Anak Sungai Di Palembang Banyak Beralih Fungsi.” infopublik.id, 2017. [https://infopublik.id/read/194984/anak-sungai-di-palembang-banyak-beralih-fungsi.html?show=.](https://infopublik.id/read/194984/anak-sungai-di-palembang-banyak-beralih-fungsi.html?show=)

